

Model LocalityVeness (Local Competitiveness): Alternatif pengukuran daya saing pariwisata Indonesia berbasis kearifan lokal

Vyana Lohjiwa*¹, Rika Fatimah², Affra Siti Nabilla³, Yayang Anggrenesia⁴

^{1,2}Universitas Gajah Mada, Indonesia, ³Institut Teknologi Bandung, Indonesia,

⁴Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Indonesia

vyanalohjiwa@mail.ugm.ac.id¹, rikafatimahpl@ugm.ac.id², affranabilla19@gmail.com³,
yayangmutiara96@gmail.com⁴

Article Info

Submitted,
31 January 2025
Revised,
23 October 2025
Accepted,
24 October 2025

Keywords:

*Destinasion
competitiveness;
Indicator destination
competitiveness;
Local authenticity;
Global cooperation*

ABSTRACT

Competitiveness is a key factor in tourism sustainable development. At the global level, tourism competitiveness is measured by Travel and Tourism Development Index (TTDI). However, this indicator widely criticized for being complex and not represent local tourism resources. A number of countries have begun to replace TTDI with develop new indicators based on local resources. In Indonesia, the government has National Tourism Development Index (IPKN), but the indicators adopt a global approach without reflecting identity of local resources. This study aims to provide an alternative perspective tourism development based on local resources. The research method used is qualitative approach with a literature study technique. Data sources include book of Kearifan Lokal Indonesia dan Lingkungan as local tourism resources, TTDI documents as structure of global indicators, and the G2R (Global Gotong Royong) Tetrapreneur approach as a bottom-up framework. The results show that Indonesia has seven elements of local tourism resources. The novelty show that formulation of "LocalityVeness" (Local Competitiveness) model, which is a model for measuring Indonesia's tourism competitiveness based on local resources. This model is expected to be a conceptual alternative to strengthen the sustainability, adaptability, and reflect the identity of Indonesian tourism.

ABSTRAK

Daya saing merupakan faktor kunci dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pada tingkat global, pengukuran daya saing pariwisata menggunakan *Travel and Tourism Development Index* (TTDI). Namun, indikator ini banyak dikritik karena bersifat kompleks dan kurang merepresentasikan sumber daya pariwisata lokal. Sejumlah negara mulai meninggalkan TTDI dan mengembangkan indikator berbasis sumber daya lokal. Di Indonesia, pemerintah telah mengembangkan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN), namun indikatornya mengadopsi pendekatan global tanpa merefleksikan potensi dan identitas sumber daya lokal. Kajian ini bertujuan memberikan pandangan alternatif bahwa penyusunan indikator daya saing pariwisata seharusnya dilakukan berlandaskan sumber daya dan kearifan lokal. Metode kajian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka. Sumber data mencakup dokumen buku *Kearifan Lokal Indonesia dan Lingkungan* untuk mengidentifikasi sumber daya pariwisata lokal, dokumen TTDI untuk melihat struktur indikator global, serta pendekatan G2R (Global Gotong Royong) *Tetrapreneur* sebagai kerangka berpikir pendekatan *bottom-up*. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tujuh unsur kearifan lokal. Kebaruan dari kajian ini terletak pada perumusan model "LocalityVeness" (*Local Competitiveness*), yaitu model pengukuran daya saing pariwisata Indonesia yang berbasis kearifan lokal. Model ini diharapkan dapat menjadi alternatif konseptual untuk memperkuat daya saing pariwisata nasional yang berkelanjutan, adaptif, dan mencerminkan identitas kepariwisataan Indonesia.

Kata kunci:

Daya saing pariwisata;
Indikator daya saing;
Kearifan lokal;
Global gotong royong

D.O.I:

<https://doi.org/10.17509/jithor.v8i2.80266>

PENDAHULUAN

Daya saing pariwisata kini menjadi faktor kunci dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (Shariffuddin et al., 2020). Pada tataran global, pengukuran daya saing pariwisata menggunakan Travel and Tourism Development Index (TTDI) yang dibuat oleh World Economic Forum (WEF) sebagai alat ukur komprehensif untuk menilai daya saing dan resiliensi suatu negara pada sektor pariwisata. TTDI ini mengacu pada lima prinsip utama, yaitu ekonomi, kebijakan, perbandingan antar negara, investasi, dan keberlanjutan (González-Rodríguez et al., 2023). Prinsip tersebut diturunkan kepada 5 indeks, 17 pilar, dan 112 indikator dan dianggap sebagai indikator yang memiliki kompleksitas tinggi (González-Rodríguez et al., 2023).

Sejalan dengan anggapan tersebut, Indikator TTDI menuai kiritik dari para peneliti (González-Rodríguez et al., 2023). Indikator TTDI dinilai sebagai konsep multidimensi dan memiliki banyak faktor yang membuat pengukurannya menjadi sulit, pembobotan yang sewenang-wenang, duplikasi informasi dan isu-isu pariwisata yang diseragamkan ditiap negara (Fernández et al., 2020). Kunst dan Ivandic (2021), menganggap bahwa TTDI tidak dapat memprediksi perubahan kinerja pariwisata secara aktual. Indikator TTDI lebih banyak melihat unsur eksternalitas dibandingkan unsur internalitas (González-Rodríguez et al., 2023). Tidak jarang peneliti yang menggunakan indikator TTDI untuk skala negara/kawasan melihat adanya perbedaan tingkat daya saing TTDI dan kinerja aktual di berbagai negara/kawasan (Hanafiah & Zulkifly, 2019). Sehingga indikator TTDI dinilai masih memiliki kelemahan karena kurang mengakomodasi kondisi atau keunikan negara/kawasan karena potensi sumber daya pariwisatanya berbeda (Enright, 2005).

Sebetulnya, sejumlah negara telah menunjukkan upaya merekonstruksi TTDI agar lebih adaptif terhadap konteks lokal. Misalnya seperti China mengembangkan *slow tourism* indicator (Tu et al., 2022), Kolombia mengembangkan *Competitiveness Community Based Tourism* (C-CBT) (Bassols & Bonilla, 2022), Jepang mengembangkan indikator daya saing alam yang mengedepankan pelestarian sumber daya alam (Murayama et al., 2022), selain itu Sri Lanka memfokuskan indikator kewirausahaan (Fernando, 2020). Indonesia membuat indikator serupa yaitu Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional (IPKN) yang disusun oleh Kementerian Pariwisata. Namun, indikator yang dibangun mengadopsi kerangka kerja, metodologi, dan indikator yang diturunkan dari TTDI bukan berbasis sumber daya pariwisata lokal.

Oleh karena itu, artikel ini menjadi signifikan karena bertujuan untuk mengusulkan pendekatan baru dengan pola *bottom-up*, dimana indikator yang dibangun akan disesuaikan dengan potensi, nilai dan kearifan lokal yang mencerminkan keunikan destinasi pariwisata di Indonesia. Cara berpikir dari lokal menuju global ini telah berhasil dilakukan pada aspek kewirausahaan yang dikenal dengan konsep Global Gotong Royong (*G2R Tetrapreneur*) dimana mengubah orientasi global menjadi aksi lokal dengan semangat gotong royong dan inovasi berbasis komunitas (Fatimah, 2018). Melalui adopsi pola berpikir G2R Tetrapreneur, pariwisata Indonesia dapat bergerak dari paradigma global menuju paradigma lokal yang mengedepankan gotong royong, inovasi komunitas, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, model daya saing pariwisata yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi cerminan identitas bangsa yang mampu memperkuat posisi

Indonesia dalam lanskap pariwisata global tanpa kehilangan akar lokalnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Kearifan lokal sebagai sumber daya pariwisata

Kearifan lokal adalah identitas budaya yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Allerton, 2003). Kearifan lokal memiliki peran penting di destinasi wisata untuk melayani wisatawan yang disesuaikan dengan budaya setempat (Allerton, 2003). Kearifan lokal dibentuk dari 7 (tujuh) unsur kebudayaan (Sari, 2017) antara lain: (1) Bahasa dengan menggunakan dialek lokal (Marhanah et al., 2025); (2) Sistem pengetahuan; (3) Organisasi Sosial; (4) Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi; (5) Sistem mata pencaharian hidup; (6) Sistem religi; dan (7) Kesenian.

Bentuk kearifan lokal dapat dikategorikan ke dalam dua aspek (Purbasari & Manaf, 2017), meliputi: (1) Kearifan lokal yang berwujud nyata (*tangible*) seperti sistem nilai, tata cara, bangunan/arsitektural, dan benda cagar budaya/tradisional (karya seni), misalnya keris, batik; dan (2) Kearifan lokal yang tidak berwujud (*intangible*) seperti petuah yang disampaikan secara verbal berupa nyanyian, nilai sosial disampaikan secara oral/verbal dari generasi ke generasi (Chhabra, 2019).

Oleh karena itu, pengembangan pariwisata yang berorientasi pada kearifan lokal bukan hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian nilai-nilai budaya dan keberlanjutan lingkungan yang menjadi roh pariwisata Indonesia, yang didukung dengan kombinasi regulasi, penerapan standar internasional, sistem pemantauan berbasis teknologi, dan edukasi oleh para pemangku kepentingan menjadi kunci

utama dalam menyeimbangkan peningkatan pariwisata global (Khadijah et al., 2025). Melibatkan berbagai pihak dan memiliki dampak luas terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Alberti, 2012; Lowe et al., 2019). Untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif pariwisata, diperlukan pengelolaan yang baik dan melibatkan semua pihak terkait (Della Corte & Aria, 2016).

Destination competitiveness

Pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang melibatkan berbagai pihak dan memiliki dampak luas terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Alberti, 2012; Lowe et al., 2019). Untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif pariwisata, diperlukan pengelolaan yang baik dan melibatkan semua pihak terkait (Della Corte & Aria, 2016). Pengelolaan pariwisata dibutuhkan dalam rangka pengembangan pengembangan pariwisata dengan fokus utama pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan konservasi lingkungan (Setiawati et al., 2025). Sehingga dapat meningkatkan daya saing pariwisata.

Menurut González-Rodríguez dkk. (2023), daya saing pariwisata tidak hanya tentang menarik wisatawan, tetapi juga tentang memberikan pengalaman yang berkesan, menghasilkan keuntungan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Pariwisata yang berdaya saing dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan berkontribusi pada pelestarian alam (Setianingtias et al., 2019). Konsep daya saing destinasi pariwisata menunjukkan bahwa kemampuan suatu destinasi untuk bersaing di pasar global dapat membawa perubahan signifikan bagi industri pariwisata dan kebijakan (Ritchie, 2010). Dengan mengukur daya saing, kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu negara/destinasi dalam menarik wisatawan dan mengembangkan

sektor pariwisata (Knežević Cvelbar et al., 2016).

Travel And Tourism Development Indeks (TTDI)

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis karena memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB global dan menciptakan lapangan kerja baru (Gómez-Vega et al., 2022; Lim, 2012). Untuk mengukur daya saing pariwisata di berbagai negara, WEF telah mengembangkan Travel and Tourism Development Index (TTDI) yang diterbitkan setiap dua tahun sekali (León et al., 2022). TTDI memberikan gambaran tentang kinerja sektor pariwisata suatu negara dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pelaku bisnis dalam mengembangkan sektor pariwisata (Lemy et al., 2021).

Tujuan TTDI adalah sebagai alat ukur untuk menilai daya saing dan resiliensi suatu negara dalam sektor pariwisata (Gomezelj, 2016; Deputi bidang kebijakan Kemenparekraf, 2025). TTDI ini mengacu pada lima prinsip utama, yaitu ekonomi, kebijakan, perbandingan antar negara, investasi, dan keberlanjutan (Deputi bidang kebijakan Kemenparekraf, 2025). Prinsip tersebut diturunkan kepada 5 indeks, 17 pilar, dan 112 indikator. Indeks ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia, harga, infrastruktur, lingkungan, teknologi, hingga pembangunan sosial (León et al., 2022). TTDI digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan sektor pariwisata dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan resiliensi pariwisata suatu negara secara keseluruhan (Fernández et al., 2020).

Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur

Global Gotong Royong (G2R) Tetrapreneur merupakan model inovasi kewirausahaan yang menggabungkan nilai lokal gotong royong dengan prinsip

wirausaha berbasis komunitas, untuk mendorong kemandirian ekonomi desa dan pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal menuju global (Fatimah, 2018). Tetra yang berarti empat, dan entrepreneur yang berarti wirausaha menjadi kerangka berpikir produk lokal menuju pangsa pasar global, dengan berprinsip pada empat tahapan antara lain:

1. Tetra 1: Rantai wirausaha (*Chainpreneur*) yang berfokus pada penciptaan rantai bisnis ditingkat lokal;
2. Tetra 2: Pasar wirausaha (*Marketpreneur*) yang berfokus kepada kegiatan produksi, inventarisasi, penentuan pasar non-kompetisi (kerjasama, pasar alternatif) ke pasar kompetisi, dan pengembangan mitra menuju akses ke pasar lokal/regional/global;
3. Tetra 3: Kualitas wirausaha (*Qualitypreneur*) yang berfokus kepada peningkatan kualitas produk, peningkatan SDM (pelatihan, sistem bisnis, manajemen produksi), standarisasi, kesiapan untuk bersaing;
4. Tetra 4: Merek wirausaha (*Brandpreneur*) yang berfokus kepada pembentukan merek/produk yang memiliki karakter ikonik, kebijakan pendukung, kerjasama *stakeholder*, sehingga produk dan desa memiliki reputasi nasional/internasional.

Cara berpikir G2R Tetrapreneur menggabungkan nilai budaya lokal seperti gotong royong, kolaborasi, dan inovasi sebagai dasar pengembangan ekonomi yang berakar pada potensi lokal namun berorientasi global (Fatimah, 2018). Konsep berpikir G2R Tetrapreneur dapat diterapkan dalam konteks pariwisata, karena memiliki kesamaan paradigma yaitu menitikberatkan pada pengembangan potensi lokal yang adaptif terhadap pasar global. Dalam konteks indikator daya saing pariwisata di Indonesia, cara berpikir ini menjadi relevan dengan menekankan pembangunan daya saing dimulai dari

kekuatan lokal menuju pengakuan global, sehingga menciptakan model pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, kontekstual, dan beridentitas nasional.

METODE

Pendekatan kajian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif, karena kajian berfokus pada upaya membangun indikator daya saing pariwisata melalui eksplorasi dan pemahaman makna dari unsur kearifan lokal sebagai sumber daya pariwisata. Data yang diperlukan bersifat deskriptif dan interpretatif, sehingga tidak dapat dijaring dengan metode kuantitatif.

Metode berpikir yang digunakan merujuk pada konsep G2R Tetrapreneur yang dikembangkan oleh [Fatimah \(2018\)](#), yang menekankan integrasi nilai-nilai budaya lokal, semangat gotong royong, dan inovasi berbasis komunitas dalam membangun daya saing. Model berpikir ini diadaptasi ke dalam konteks pariwisata melalui empat tahapan, yaitu *chainpreneur*, *marketpreneur*, *qualitypreneur*, dan *brandpreneur*.

1. Tahap *Chainpreneur* dilakukan dengan identifikasi kearifan lokal melalui studi dokumentasi terhadap buku Kearifan Lokal Indonesia dan Lingkungan, untuk menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan sumber daya pariwisata;
2. Tahap *Marketpreneur* berfokus pada pemetaan indikator global melalui telaah terhadap Travel and Tourism Development Index (TTDI) sebagai acuan *benchmarking*;
3. Tahap *Qualitypreneur* melibatkan analisis terhadap kebijakan, standar, dan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Indonesia;
4. Tahap *Brandpreneur* belum dapat dilaksanakan dalam kajian ini, karena

tahap tersebut dilakukan setelah model indikator daya saing baru terbentuk dan siap dibandingkan antar destinasi pariwisata di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, dengan seluruh data bersumber dari data sekunder berupa dokumen, laporan, jurnal, dan kebijakan resmi yang relevan. Oleh karena itu, kajian ini tidak memiliki lokasi lapangan dalam arti geografis, tetapi berfokus pada Indonesia sebagai konteks kajian, khususnya dalam menganalisis indikator Travel and Tourism Development Index (TTDI). Untuk menjaga validitas dan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi berbagai dokumen sekunder dari sumber yang berbeda agar diperoleh interpretasi yang objektif dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan lokal sebagai sumber daya pariwisata

Tahapan pertama dalam kajian ini yaitu melihat *Chainpreneur* yang dilakukan dengan identifikasi kearifan lokal melalui studi dokumentasi terhadap buku Kearifan Lokal Indonesia dan Lingkungan, untuk menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan sumber daya pariwisata. Buku ini merupakan hasil karya bersama dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013. Buku ini berpendapat bahwa kearifan lokal merupakan tema yang sering diangkat tetapi masih jarang muncul sebagai hasil interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Dalam buku ini, berikut merupakan unsur kearifan lokal dan penerapan yang bisa dimanfaatkan pada aspek pariwisata ([Tabel 1](#)).

Indikator TTDI

Tahapan kedua dalam kajian ini yaitu melihat *Marketpreneur* berfokus pada pemetaan indikator global melalui telaah terhadap Travel and Tourism Development Index (TTDI) sebagai acuan *benchmarking*. TTDI mempertimbangkan berbagai faktor, tetapi kerangka besarnya terdiri dari 5 pilar antara lain: (1) *Enabling Environment*; (2) *Travel and Tourism Policy and Enabling Conditions*; (3) *Infrastructure*; (4) *Travel and Tourism Demand Drivers*; dan (5) *Travel and Tourism Sustainability*. Dengan terjadinya Pandemi COVID-19 telah mengubah aspek pariwisata secara drastis. Wisatawan kini lebih selektif dan memprioritaskan kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan. Industri pariwisata pun harus beradaptasi dengan perubahan ini. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi sektor pariwisata menerapkan prinsip-prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan ketahanan. Harapannya sektor pariwisata dapat bangkit dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian global.

Indikator TTDI dikejar oleh setiap negara (Tabel 2), karena semakin berdaya saing suatu negara semakin banyak pula wisatawan yang berkunjung (Fernández et al., 2020). Satu sisi indikator ini menjadi acuan bagi negara agar terus bersaing untuk memperlihatkan kualitas pariwisata. Namun di sisi lain, TTDI juga menjadi bumerang karena sering kali mendorong orientasi pembangunan pariwisata yang berfokus pada kuantitas kunjungan semata demi peningkatan peringkat global. Pemikiran inilah yang kemudian banyak dikritisi oleh para akademisi dan praktisi, yang menilai perlunya pengembangan alternatif indikator daya saing yang lebih kontekstual, yakni indikator yang disusun berdasarkan potensi dan kearifan lokal tiap negara. Oleh karena itu, dalam kajian ini, pilar-pilar yang terdapat dalam TTDI akan

ditelaah dan dianalisis secara komparatif dengan hasil identifikasi nilai-nilai kearifan lokal pada tahap pertama, guna menemukan keterkaitan dan peluang integrasi di antara keduanya.

Merujuk pada cara berpikir G2R Tetrapreneur, nilai-nilai lokal diposisikan sebagai pasar non-kompetitif, yaitu sistem ekonomi yang berbasis kearifan dan kolaborasi komunitas. Pasar non-kompetitif ini diharapkan dapat berkembang menjadi pasar kompetitif yang sehat, dengan tetap menjadikan nilai-nilai lokal sebagai fondasi utama. Dalam konteks kajian ini, ke tujuh unsur kearifan lokal tersebut standar kualitas dari unsur kelokalan dan dikomparasi dengan indikator global TTDI. Tetapi kendalanya adalah, ketika mengelaborasi unsur lokal dengan global, perlu dilindungi oleh regulasi dan kebijakan nasional, khususnya undang-undang yang menaungi unsur kearifan lokal, yang kemudian menjadi dasar dalam tahap analisis kebijakan sebagai bentuk penguatan standar kualitas pariwisata berbasis kearifan lokal.

Kebijakan terkait kearifan lokal sebagai sumber daya pariwisata

Tahapan ketiga dalam kajian ini yaitu melihat Qualitypreneur yang melibatkan analisis terhadap kebijakan, standar, dan regulasi yang menaungi pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di Indonesia. Tahapan ini sejalan dengan konsep G2R Tetrapreneur, yang menekankan bahwa kualitas suatu entitas harus siap bertransformasi dari pasar non-kompetitif menuju pasar kompetitif melalui penerapan unsur standarisasi dan penguatan mutu. Dalam konteks pariwisata, hal ini berarti bahwa nilai-nilai kearifan lokal perlu diposisikan dalam kerangka kebijakan dan standar nasional agar memiliki daya saing yang adaptif terhadap dinamika global. Oleh

karena itu, pada tahap ini dilakukan telaah terhadap berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan kearifan lokal sebagai sumber daya pariwisata (Tabel 3), untuk melihat sejauh mana regulasi tersebut memberikan legitimasi dan arah penguatan terhadap nilai-nilai kelokalan.

Setelah pemetaan terhadap kebijakan dan standar kualitas dilakukan, analisis selanjutnya diarahkan untuk mengintegrasikan hasil temuan tersebut ke dalam pendekatan G2R Tetrapreneur guna membentuk model daya saing pariwisata berbasis kearifan lokal. Model ini diharapkan mampu menunjukkan bagaimana nilai-nilai lokal dapat diolah menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan pariwisata Indonesia.

Daya saing pariwisata berbasis kearifan lokal

Setelah melakukan tahapan 1-3, dilakukan pemodelan dengan pendekatan G2R Tetrapreneur sehingga terlihat mana indikator, unsur, dan kebijakan yang saling berkaitan (Gambar 1).

Hasil analisis dalam kajian ini menunjukkan bahwa daya saing pariwisata global dapat diperkaya dengan menambahkan unsur kearifan lokal serta memperkuat melalui standar kualitas yang ditetapkan dalam kebijakan nasional. Melalui cara berpikir G2R Tetrapreneur, kajian ini berhasil merumuskan sebuah model baru yaitu daya saing pariwisata berbasis kearifan lokal, yang dinamakan Model *LocalityVeness* (*Local Competitiveness*). Model ini menggambarkan bahwa penguatan daya saing pariwisata tidak semata-mata bertumpu pada indikator global, tetapi juga pada kekuatan nilai-nilai lokal yang diatur dan dilindungi oleh kebijakan nasional.

Temuan kajian ini menemukan bahwa terdapat tiga indikator global TTDI yang memiliki keterkaitan langsung dengan

tujuh unsur kearifan lokal, yaitu: (1) *Human Resources and Labour Market*, (2) *Environmental Sustainability*, dan (3) *Cultural Resources*. Ketiga indikator tersebut dapat diintegrasikan dengan tiga regulasi utama yang berperan penting dalam menopang kebijakan berbasis kearifan lokal. Pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berhubungan dengan potensi aset desa, pembentukan BUMDesa, serta kerja sama antar desa yang relevan dengan unsur sistem pengetahuan dan kesenian lokal. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berkaitan dengan sistem pengetahuan, organisasi sosial, serta sistem peralatan hidup yang berbasis lingkungan. Ketiga, Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda, yang mencakup unsur bahasa, sistem religi, dan kesenian sebagai representasi dari warisan budaya nonmaterial Indonesia.

Dengan demikian, Model *LocalityVeness* (*Local Competitiveness*) menawarkan alternatif konseptual bagi Indonesia dalam membangun daya saing pariwisata yang berkelanjutan dan berkarakter lokal. Model ini menegaskan bahwa tujuh unsur kearifan lokal dapat dijadikan inti utama dari pengembangan daya saing pariwisata nasional, karena seluruhnya telah memiliki dasar hukum dan kebijakan yang kuat sebagai payung pengembangan sektor pariwisata berbasis identitas bangsa. (Penjelasan lebih lanjut mengenai Model *LocalityVeness* dapat dilihat dalam *appendix*)

Tabel 1. Unsur kearifan lokal sebagai sumber daya pariwisata

No.	UNSUR KEARIFAN LOKAL	KEARIFAN LOKAL DALAM PENERAPAN PARIWISATA
1	Bahasa	Jawa Barat: Perilaku budaya dilihat dari ekspresi seperti mengucapkan salam “sampurasun”, dijawab “rampes”
2	Sistem Pengetahuan	Bali dan Lombok: Masyarakat mempunyai awig-awig (Aturan-aturan). Sebagai contoh falsafah Tri Hita Karana yaitu hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan lingkungan. Branding “Solo the Spirit of Jawa” sebagai upaya merevitalisasi di dataran nilai-nilai, filosofi atau pandangan hidup; sistem kehidupan masyarakat dalam berinteraksi dan menjalani kehidupannya.
3	Organisasi Sosial	Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, terdapat tradisi tana’ulen. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pulau Jawa: Perilaku masyarakat dalam membangun rumah tinggal di Jawa mengenal istilah gotong royong Hukum adat masyarakat Salawati di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat dan berdasarkan sebuah sistem konfederasi. Sistem pemerintahan ini terdiri dari pemerintahan pusat dan kampung. Sedangkan organisasi pemerintah persekutuan hukum adat memiliki lembaga-lembaga adat yang masing-masing mempunyai fungsi adat.
4	Sistem peralatan hidup & teknologi	Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Pranoto Mongso (Jawa) Pranoto mongso atau aturan waktu musim digunakan oleh para tani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan dipakai sebagai patokan untuk mengolah pertanian. Kabupaten Wonosobo mengenal Nyabuk Gunung atau cara bercocok tanam dengan membuat teras sawah yang dibentuk menurut garis kontur. Cara ini banyak dilakukan di lereng bukit sumbing dan sindoro. Tumpang sari Sistem: Praktek penanaman beragam biji-bijian sebagai bagian dari peladangan berpindah yang banyak meniru kompleksitas dan keragaman sistem vegetasi wilayah sub-tropis dan tropis. Perilaku masyarakat dalam mengelola sumberdaya pengairan di Bali dikenal dengan subak, Pembahasan mengenai sistem pertanian organik sebagai alternatif mewujudkan kedaulatan pangan tercakup dalam tulisan Bakti Utama, yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan pertanian masyarakat Godean di Yogyakarta mengenai budidaya pertanian organik dengan sistem SRJ (<i>System of Rice Intensification</i>).
5	Sistem Mata Pencarian Hidup	Papua, terdapat kepercayaan <i>te aro neweak lako</i> (alam adalah aku). Gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai jiwa hidup manusia, sehingga dalam pemanfaatan sumber dayanya, masyarakat Papua akan lebih berhati-hati dan selalu menjaga sumber dayanya. Kearifan lokal masyarakat Simeulue di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Ketika bencana tsunami atau dalam bahasa lokal dikenal dengan istilah <i>smong</i> terjadi di Aceh pada tahun 2004, warga masyarakat Simeulue banyak terselamatkan dari jumlah korban jiwa yang tinggi seperti di wilayah-wilayah Aceh lainnya.
6	Sistem Religi	Serawai, Bengkulu, terdapat keyakinan celako kumali. Kelestarian lingkungan terwujud dan kuatnya keyakinan ini yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak. Upaya-upaya pelestarian hutan-hutan kecil di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali yang senantiasa dilakukan dan terjaga dibahas dalam tulisan Budiana Setiawan, yang mengkategorikan hutan-hutan ini ke dalam hutan-hutan keramat atau situs keramat alami (<i>sacred natural sites</i>). Hutan Karangkamulyan di Jawa Barat, hutan Alas Ketangga di Jawa Timur, dan hutan Sangeh di Bali merupakan lingkungan alam hutan yang dijaga oleh masyarakat perkampungan di sekitar hutan, melalui berbagai larangan-larangan adat yang ketat serta sanksi adat bagi yang melanggar. Kearifan lokal yang disangga oleh keberadaan kampung-kampung adat di Jawa Barat dimana adanya keterkaitan antara kehidupan sosial, ekonomi dan budaya komunitas-komunitas perkampungan adat dengan pelestarian berbagai warisan budaya, arsitektur tradisional dan lingkungan alam terutama dalam wujud hutan-hutan adat yang terletak di sekitar perkampungan adat mereka. Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh Jawa Barat. Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan hati-hati. Tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas ijin sesepuh adat.
7	Kesenian	Kekayaan budaya berupa batik Laweyan dan Kauman, kawasan bangunan cagar budaya beserta kehidupan masyarakatnya menjadi daya tarik wisata yang ditawarkan kepada wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Seni kriya <i>bidai</i> yang merupakan bentuk dari pengetahuan lokal Dayak Bidayuh yang telah menjadi komoditas perdagangan lintas batas Indonesia dengan Malaysia.

Sumber: Olahan peneliti, 2024

Vyana Lohjiwa, Rika Fatimah, Affra Siti Nabilla, Yayang Anggrenesia:
Model LocalityVeness (Local Competitiveness): Alternatif pengukuran daya saing pariwisata
Indonesia berbasis kearifan lokal

Tabel 2. Indikator TTDI

No.	Pilar	Penjelasan dan indeks indikator
1	<i>Enabling Environment</i>	Pilar lingkungan memberikan gambaran tentang kondisi suatu negara yang mendukung kegiatan bisnis pariwisata pariwisata. Pilar ini memiliki 5 indikator antara lain Lingkungan Bisnis, Keamanan dan Keselamatan, Kesehatan dan Kebersihan, Sumber Daya Manusia dan Pasar Tenaga Kerja, dan Kesiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2	<i>Travel and Tourism Policy and Enabling Conditions</i>	Pilar Kebijakan Perjalanan dan Pariwisata ini mengukur seberapa baik suatu negara merancang dan menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Pilar ini terbagi menjadi tiga indikator antara lain Otoritas Perjalanan dan Pariwisata, Keterbukaan Internasional, dan Daya Saing Harga.
3	<i>Infrastructure</i>	Pilar Infrastruktur ini mengukur seberapa baik infrastruktur fisik suatu negara mendukung kegiatan pariwisata. Pilar ini terbagi menjadi tiga indikator antara lain Infrastruktur Transportasi Udara, Infrastruktur Darat dan Pelabuhan, dan Infrastruktur Layanan Pariwisata.
4	<i>Travel and Tourism Demand Drivers</i>	Pilar ini mengukur apa yang membuat orang tertarik untuk mengunjungi suatu negara. Dengan kata lain, apa saja yang menjadi daya tarik utama suatu destinasi wisata. Pilar ini terbagi menjadi tiga indikator antara lain Sumber Daya Alam, Sumber Daya Budaya, dan Sumber Daya Non-Liburan.
5	<i>Travel and Tourism Sustainability</i>	Pilar ini mengukur seberapa berkelanjutan sektor pariwisata di suatu negara. Dengan kata lain, seberapa baik sektor pariwisata menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pilar ini terbagi menjadi tiga indikator antara lain Keberlanjutan Lingkungan, Ketahanan dan Kondisi Sosial Ekonomi, dan Tekanan dan Dampak Permintaan Pariwisata.

Sumber: Olahan peneliti, 2024

Tabel 3. Kebijakan terkait unsur kearifan lokal

Kebijakan	Pasal dan penjelasan
UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 298 Belanja yang menjadi acuan potensi sumber dana pembangunan kepariwisataan desa; Pasal 371-372 Desa dan kewenangannya yang diatur dalam uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Pasal 4 Tentang tujuan pengaturan desa Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa yang dapat menjadi acuan tentang bentuk usaha pariwisata desa. Bab XI tentang Kerjasama desa mengatur kerja sama antar (2 atau lebih) desa dengan pihak ke tiga yang dapat menjadi acuan dalam kemitraan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa	Perencanaan pembangunan desa adalah proses pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial
UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya	Pasal 1 Arti Cagar Budaya dan jenisnya–benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan-cagar budaya. Pasal 12 (ayat 1 dan 2) Setiap orang dapat memiliki dan atau menguasai benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya dengan memperhatikan fungsi sosialnya Pasal 13 Kawasan cagar budaya hanya dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh negara, kecuali secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Pasal 22 (ayat 1 dan 2) Pemilik dan atau penguasa cagar budaya berhak memperoleh kompensasi dan insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi cagar budaya. Pasal 42 (huruf e) Cagar budaya yang memenuhi syarat sebagai contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah dapat ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional.

Kebijakan	Pasal dan penjelasan
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup	Pasal 54 Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari pemerintah atau pemerintah daerah atas upaya pelestarian cagar budaya yang dimiliki dan atau dikuasainya. Pasal 63 dan 64 Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengaman cagar budaya dan harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan dan pariwisata. Pasal 78 (ayat 3) Pengembangan cagar budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 85 (ayat 1 dan 2) Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata yang difasilitasi pemanfaatan dan promosinya oleh pemerintah dan pemerintah daerah. (Ayat 3) Fasilitas pemanfaatan cagar budaya berupa ijin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli pelestarian, dukungan dana dan atau pelatihan. (Ayat 4) Promosi dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat. Pasal 22: (1) (Ayat 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal; (2) (ayat 2) Kriteria dampak penting: a. besarnya jumlah penduduk; b. luas wilayah; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pasal 67 - Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 68 - Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: (1) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; (2) Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan (3) Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup
Permendikbud No. 106 Tahun 2013	Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia = kearifan lokal. Yang termasuk warisan budaya takbenda Indonesia terdiri atas: (1) Tradisi dan ekspresi lisan, (2) Seni pertunjukan, (3) Adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan, (4) Pengetahuan dan Kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, (5) Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang didefinisikan Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014	Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.” Konsepsi Tradisi Berdesa merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUMDesa. Tradisi Berdesa paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDesa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa dalam pendirian BUMDesa adalah: BUMDesa membutuhkan modal sosial BUMDesa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah Desa BUMDesa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa BUMDesa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. BUMDesa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. BUMDesa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (<i>government driven</i>; proyek pemerintah) menjadi milik Desa.
Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) – Prinsip BUMDesa	Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Inilah yang menjadi landasan prinsip - prinsip berdirinya BUMDesa antara lain Kooperatif, Partisipatif. Emansipasi, Transparan, Akuntabel, dan Berkelanjutan.

Kebijakan	Pasal dan penjelasan
Peraturan Menteri Desa	Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015	Pada Pasal 2 BAB II Permendesa No 4 Tahun 2015 tersebut secara jelas disebutkan maksud didirikannya BUMDesa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum
Undang-undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan,	Kegiatan desa wisata atau wisata desa yang dijadikan sebagai destinasi, senapas dengan Permendesa No 4 Tahun 2015 Pasal 3 (point b.) terkait dengan pengoptimalan asset desa untuk kesejahteraan desa (baca: masyarakat desa).
Rencana Induk Perencanaan Pariwisata Nasional	Khususnya penjelasan mengenai tujuan kepariwisataan yang salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokasi desatinasi wisata di sebuah desa.
	Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi: (1) Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata, (2) Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata, (3) Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah, (4) Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.

Sumber: Olahan peneliti, 2024

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa daya saing pariwisata Indonesia tidak hanya dapat diukur melalui pendekatan global Travel and Tourism Development Index (TTDI) yang bersifat universal dan kompleks, tetapi perlu dikembangkan melalui pendekatan berbasis potensi dan kearifan lokal. Melalui cara berpikir G2R Tetrapreneur, kajian ini membangun kerangka berpikir *bottom-up* dalam penyusunan indikator daya saing pariwisata yang lebih kontekstual terhadap karakteristik sosial-budaya Indonesia.

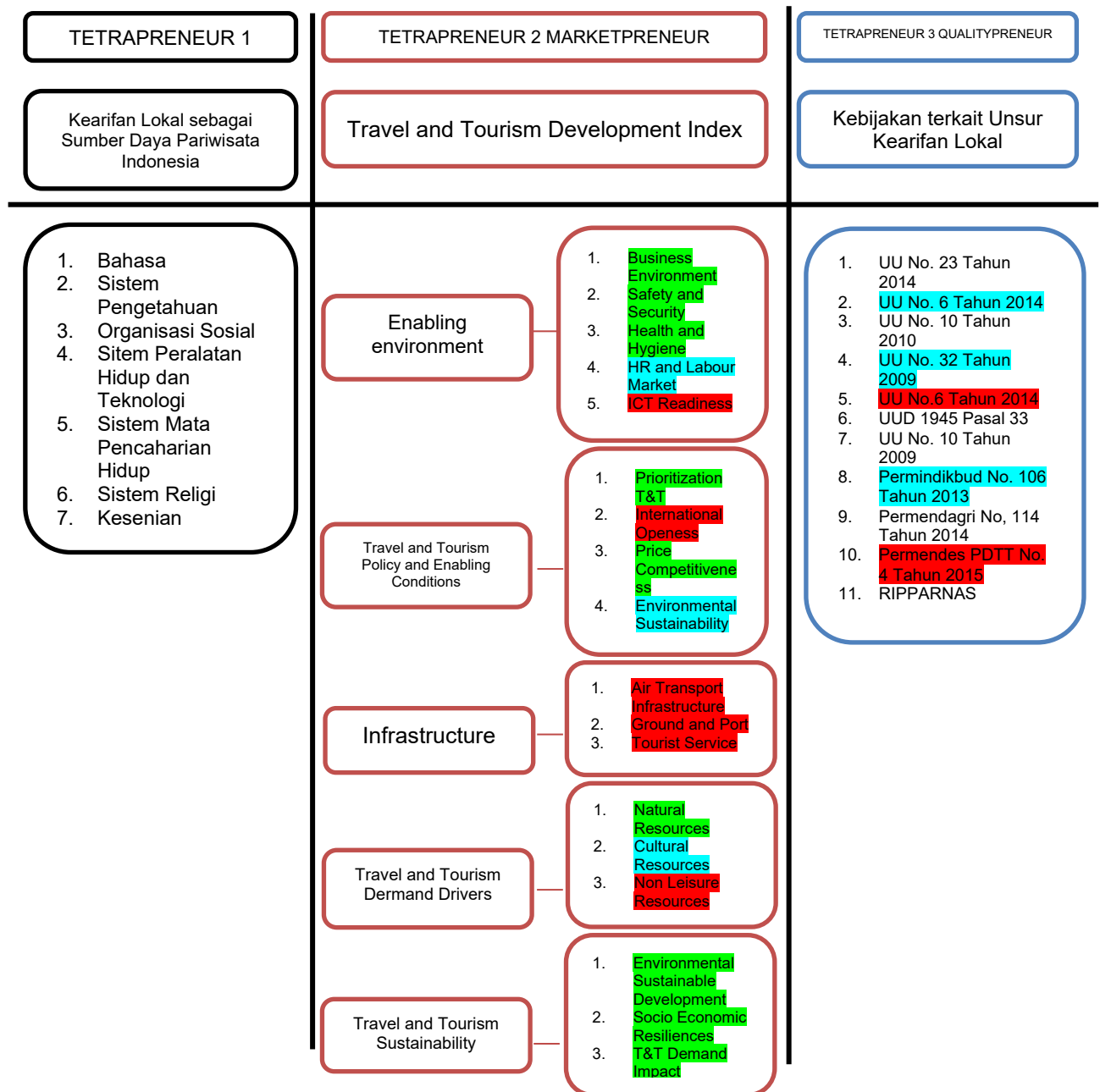
Kajian ini menawarkan Model LocalityVeness (Local Competitiveness) sebagai alternatif konseptual dalam mengukur dan mengembangkan daya saing pariwisata berbasis kearifan lokal. Model ini menempatkan kearifan lokal sebagai inti dari daya saing dan menghubungkannya dengan kebijakan nasional, sehingga menghasilkan pendekatan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, adaptif, dan mencerminkan identitas bangsa.

Tujuan kajian ini telah tercapai. Namun, kajian ini perlu dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi model

LocalityVeness kepada para pengelola destinasi dan pemangku kepentingan pariwisata, agar dapat diteruskan ke tahapan empat yaitu Brandpreneur. Tahapan ini penting untuk menguji kesiapan model LocalityVeness sebagai model alternatif daya saing pariwisata berbasis kearifan lokal yang dapat diterapkan secara nyata di destinasi pariwisata Indonesia.

Kajian ini memiliki keterbatasan karena masih melihat keterkaitan antar unsur secara subjektif dari perspektif peneliti. Oleh karena itu, kajian lanjutan disarankan untuk melibatkan para pemangku kepentingan pariwisata dalam proses validasi, guna mengonfirmasi hubungan antara pilar TTDI, unsur kearifan lokal, dan kebijakan yang menaunginya. Dengan demikian, model ini dapat berkembang dari sebuah diskursus konseptual menjadi model terapan yang memiliki validitas dan kredibilitas tinggi, sekaligus memberikan arah baru bagi pengembangan pariwisata Indonesia yang berdaya saing dan berakar pada nilai-nilai budaya lokal.

Appendix



Gambar 1. Model daya saing pariwisata berbasis kearifan lokal pendekatan G2R Tetrapreneur

Sumber: Olahan peneliti, 2024

Keterangan:

- : Indikator yang tidak memiliki hubungan
- : Indikator yang memiliki hubungan
- : Indikator yang berdaya saing berbasis kearifan lokal

DAFTAR PUSTAKA

- Alberti, F. G. (2012). Cultural heritage, tourism and regional competitiveness: The Motor Valley cluster. *City, Culture and Society*, 3(4), 261–273. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2012.11.003>
- Allerton, C. (2003). Authentic housing, authentic culture? Transforming a village into a “tourist site” in Manggarai, Eastern Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 31(89), 119–128. <https://doi.org/10.1080/13639810304440>
- Bassols, N., & Bonilla, J. (2022). Community-based tourism and destination competitiveness: Bridging the gap. *Enlightening Tourism*, 12(1), 145–176. <https://doi.org/10.33776/et.v12i1.5125>
- Chhabra, D. (2019). Authenticity and the authentication of heritage: Dialogical perceptiveness. *Journal of Heritage Tourism*, 14(5–6), 389–395. <https://doi.org/10.1080/1743873X.2019.1644340>
- Della Corte, V., & Aria, M. (2016). Coopetition and sustainable competitive advantage. The case of tourist destinations. *Tourism Management*, 54, 524–540. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.12.009>
- Deputi Bidang Kebijakan Strategis. (2025). Laporan renstra perubahan kemenparekraf/baparek 2020-2024. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. <https://api.kemenpar.go.id/storage/app/uploads/public/688/841/fe6/688841fe608a3881576471.pdf>
- Enright, M. J. (2005). Determinants of tourism destination competitiveness in Asia Pacific: Comprehensiveness and universality. *Journal of Travel Research*, 43(4), 339–350. <https://doi.org/10.1177/0047287505274647>
- Fatimah, P. R. (2018). Mengembangkan kualitas usaha milik desa (Q-BUMDes) untuk melestarikan ketahanan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan adaptif: Perancangan sistem kewirausahaan desa dengan menggunakan model tetrapreneur. *Jurnal Studi Pemuda*, 7(2), 122–132. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.39551>
- Fernández, J. A. S., Azevedo, P. S., Martín, J. M. M., & Martín, J. A. R. (2020). Determinants of tourism destination competitiveness in the countries most visited by international tourists: Proposal of a synthetic index. *Tourism Management Perspectives*, 33, 100582. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100582>
- Fernando, I. N. (2020). Tourism competitiveness by shift-share analysis to way-forward destination management: A case study for Sri Lanka. *Journal of Tourism and Services*, 11(21), 88–102. <https://doi.org/10.29036/jots.v11i21.139>
- Gómez-Vega, M., Herrero-Prieto, L. C., & López, M. V. (2022). Clustering and country destination performance at a global scale: Determining factors of tourism competitiveness. *Tourism Economics*, 28(6), 1605–1625. <https://doi.org/10.1177/13548166211007598>
- Gomezelj, D. (2016). A systematic review

- of research on innovation in hospitality and tourism. In *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 28(3), 516–558. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2014-0510>
- González-Rodríguez, M. R., Díaz-Fernández, M. C., & Pulido-Pavón, N. (2023). Tourist destination competitiveness: An international approach through the travel and tourism competitiveness index. *Tourism Management Perspectives*, 47. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2023.101127>
- Hanafiah, M. H., & Zulkifly, M. I. (2019). Tourism destination competitiveness and tourism performance: A secondary data approach. *Competitiveness Review*, 29(5), 592–621. <https://doi.org/10.1108/CR-07-2018-0045>
- Kunst, I., & Ivandić, N. (2021). The viability of the travel and tourism competitiveness index as a reliable measure of destination competitiveness: the case of the Mediterranean region. *European Journal of Tourism Research*, 27, 2704–2704. <https://doi.org/10.54055/ejtr.v27i.2124>
- Khadijah, S. A. R., Ayu, J. P., DC, Y. P. P. W., Hamdani, A. R. T., & Rachmawati, D. (2025). Pengembangan wisata berkelanjutan dan konservasi ekosistem darat di Taman Nasional Komodo. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 8(1), 79–98. <https://doi.org/10.17509/jithor.v8i1.79010>
- Knežević Cvelbar, L., Dwyer, L., Koman, M., & Mihalič, T. (2016). Drivers of Destination competitiveness in tourism: A global investigation. *Journal of Travel Research*, 55(8), 1041–1050. <https://doi.org/10.1177/0047287515617299>
- Lemy, D. M., Pramezwary, A., Juliana, Pramono, R., & Qurotadini, L. N. (2021). Explorative study of tourist behavior in seeking information to travel planning. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 16(8), 1583–1589. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.160819>
- León, V. E. P., Guerrero, F. M., & Caballero, R. (2022). Tourism competitiveness measurement. A perspective from Central America and Caribbean destinations. *Tourism Review*, 77(6), 1401–1417. <https://doi.org/10.1108/TR-03-2022-0119>
- Lim, H.-C. (2012, February 29). World Economic Forum. In *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization*. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9780470670590.wbeog827>
- Lowe, J., Tejada, J. F. C., & Meekan, M. G. (2019). Linking livelihoods to improved biodiversity conservation through sustainable integrated coastal management and community based dive tourism: Oslob Whale Sharks. *Marine Policy*, 108, 103630. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.103630>
- Marhanah, S., Senen, S. H., Romadoni, R., Rohmah, G., & Harto, B. (2025). Iklim organisasi sebagai senjata rahasia untuk meningkatkan kinerja pegawai secara spektakuler di industri perhotelan. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality*

- and Recreation*, 8(1), 115–128.
<https://doi.org/10.17509/jithor.v8i1.80497>
- Murayama, T., Brown, G., Hallak, R., & Matsuoka, K. (2022). Tourism destination competitiveness: Analysis and strategy of the Miyagi Zaō Mountains Area, Japan. *Sustainability (Switzerland)*, 14(15).
<https://doi.org/10.3390/su14159124>
- Purbasari, N., & Manaf, A. (2017). Karakteristik elemen sistem pariwisata ekowisata desa wisata Nglanggeran dan wisata desa pada desa wisata Pentingsari. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 13(1), 100.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v13i1.15151>
- Ritchie, J. R. B. (2010). A model of destination competitiveness/sustainability: Brazilian perspectives. *Revista de Administracao Publica*, 44(5), 1049–1066.
<https://doi.org/10.1590/S0034-76122010000500003>
- Setianingtias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). Pemodelan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(2), 61–74.
<https://doi.org/10.14203/jep.27.2.2019.61-74>
- Setiawati, S., Febriamansyah, R., Reflinaldon, R., Rusfidra, R., Lucida, H., Mutiara, V. I., ... & Fiza, N. (2025). Analisa pengembangan wisata alam dan budaya lokal: Studi kasus di Kecamatan Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 8(1), 43-56.
<https://doi.org/10.17509/jithor.v8i1.76947>
- Shariffuddin, N. S. M., Zain, W. M. A. W. M., & Azinuddin, M. (2020). Collaborative challenges among stakeholders on tourism destination competitiveness. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(1), 454–466.
- Tu, W., Zhou, L., Haobin, B. Y., & Yan, Q. (2022). Conceptualizing and assessing the competitiveness of slow tourism destinations: Evidence from the first accredited cittaslow in China. *Sage Open*, 12(1).
<https://doi.org/10.1177/21582440211068823>

